



**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu adanya penetapan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Utama BKKBN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan

1. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus dicapai serta indikator *output*, indikator *outcome*, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Indikator Kinerja Tujuan yang selanjutnya disebut dengan IKT adalah ukuran atau indikator yang digunakan oleh BKKBN untuk mengevaluasi Tujuan

BKKBN sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019.

3. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut dengan IKU adalah ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN tahun 2015-2019.
6. Sasaran Kegiatan adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program.
7. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah ukuran keberhasilan unit kerja dalam mencapai sasaran kegiatan (*output*).
8. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut dengan RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

12. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja adalah dokumen pelaksanaan yang mencantumkan target setiap triwulan untuk digunakan sebagai tahap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
13. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
14. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
17. Unit Kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon I di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penetapan kinerja di lingkungan BKKBN dilakukan melalui:

- a. penetapan IKT;
- b. penetapan IKU; dan
- c. penetapan IKK;

Bagian Kedua

Penetapan Indikator Kinerja Tujuan

Pasal 4

- (1) IKT merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan organisasi.
- (2) IKT BKKBN periode RPJMN 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *impact*.

Pasal 5

- (1) Pengukuran IKT BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Sensus Penduduk; atau
 - b. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS);
- (2) Periode pengukuran IKT BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode RPJMN 2015-2019.

Bagian Ketiga
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Pasal 6

- (1) IKU merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang terdiri dari:
 - a. Sasaran Strategis; dan
 - b. Sasaran Program.
- (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran pada tingkat organisasi.
- (3) Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran pada tingkat unit kerja eselon I.
- (4) IKU BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *outcome*.

Pasal 7

- (1) Pengukuran IKU BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui:
 - a. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI);
 - b. Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP);
 - c. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS);
 - d. Pendataan Keluarga (PK); dan
 - e. Metode pengukuran lain yang ditentukan.
- (2) Periode pengukuran IKU BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

Bagian Keempat
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan;

Pasal 8

- (1) IKK merupakan ukuran keberhasilan unit kerja eselon II yang terdiri atas sasaran kegiatan.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran pada tingkat unit kerja eselon II.
- (3) IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *output*.

Pasal 9

- (1) Pengukuran IKK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendataan Keluarga (PK);
 - b. QPR (Quality, Process, Result) BSC BKKBN; dan
 - c. Metode pengukuran lain yang ditentukan.
- (2) Periode pengukuran IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Monitoring IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pasal 10

Tujuan Pelaksanaan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja;
- d. rencana aksi pencapaian kinerja;

- e. laporan kinerja; dan
- f. evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pasal 11

Formulir penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I dan II di Lingkungan BKKBN harus melakukan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
- (3) Hasil penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Kinerja di Lingkungan BKKBN, maka kepada setiap Pejabat Tinggi Madya wajib melakukan pembinaan dalam pencapaian kinerja.

Pasal 14

Evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama BKKBN.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR
KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019
1.	Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1.21

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.31	2.28
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61.1	61.3
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10.14	9.91
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22.30	23.50
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25	24.6

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
1	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,39	7,33
		2	ASFR 15-19 Tahun	40 per 1000 perempuan 15-19 tahun	38 per 1000 perempuan 15-19 tahun
		3	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	70
		4	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	50
		5	Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	51	52
		6	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	48	50
		7	Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
	2018			2019	
2	Terimplementasikannya Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan	1	Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	34 provinsi; 240 Kab/Kota (43% dari 547 Kab/Kota); 35% K/L	34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 547 Kab/Kota); 40% K/L
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan KB dan KR	1	Jumlah PA Tambahan	1.150.000	965.000
		2	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)	48%	60%
4	Meningkatnya Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas	1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	15,5%	15%
		2	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama	9,1%	9%
		3	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	20,9	21
5	Meningkatnya Penghayatan Norma Keluarga Kecil	1	Persentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal	65%	70%
		2	Persentase remaja yang mengadopsi norma Usia Kawin ideal	71%	72%
		3	Persentase potensial demand	13,7%	13,2%

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		4	Persentase Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	45%	60%
6	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1	Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	1
		2	Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP
		3	Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	5
		4	Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	60% pengembangan SDM	63% pengembangan SDM
		5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4	4 dari skala 1-4
		6	Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	34 prov

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		7	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program
		8	Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatutan	100%	100%
		9	Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional	100%	100%
		10	Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi	100%	100%
		11	Persentase pelayanan kerumahtanggan & protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana & prasarana yang sesuai dengan standar	100%	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		2	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 prov	34 prov
8	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran	1	Persentase penurunan temuan eksternal	50%	45%
		2	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	90%	95%
		3	Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Intergritas Wilayah	90%	95%
9	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	1	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	90% SDM Aparatur	100% SDM Aparatur
		2	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1	1

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		3	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3	3
		4	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,3 (dari skala 1-4)	3,4 (dari skala 1-4)
		5	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	34 prov	34 prov
10	Meningkatnya kualitas pelatihan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penentu kebijakan	1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan program KKBPK	83	87
		2	Persentase tenaga program nasional yang terlatih	75%	80%
		3	Jumlah negara pengirim peserta program pelatihan internasional	20	21
		4	Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikuti pelatihan kompetensi	62%	62%
		5	Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang Terakreditasi	1	1

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
1	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan	1	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan	14 (sektor)	16 (sektor)
		2	Persentase pemerintah Provinsi dan kab/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah	Prov 100% Kab/kota 40%	Prov 100% Kab/kota 60%
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian Penduduk	34 prov	34 prov
2	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua	1	Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	45% sektor; 30% provinsi; 25% Kab/Kota	50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
	sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota	2	Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain pembangunan kependudukan	90% kab/kota	100% kab/kota
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	34 provinsi	34 provinsi
3	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan	1	Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan	100%	100%
		2	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	100%	100%
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan	34	34
4	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis	1	Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah	6	6
		2	Jumlah kabupaten/kota/sector yang menginternalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam perencanaan program dan kegiatan	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	14 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian dampak kependudukan	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	13 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
5	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah	1	Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan	54,5	55
		2	Persentase Faskes Jalur Pemerintah yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah)	81,7%	100%
		3	Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)	71,1%	85%
		4	Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarannya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarannya pada 2019 = 45.340 faskes)	86,6%	100%
		5	Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi
		6	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Pemerintah yang berkualitas	34 provinsi	34 provinsi
6	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi	1	Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang	66%	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		1	sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)		
		2	Persentase Faskes swasta yang terakreditasi/rekognisi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan KB	30%	50%
		3	Persentase Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	64,5%	66%
		4	Persentase terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Swasta yang berkualitas	100%	100%
7	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	48% Kab Galciltas dan 55% Wilayah Kota	60% Kab Galciltas dan 65% Wilayah Kota
		2	Persentase Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan wilayah miskin perkotaan yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	48% Kab dan 55% Kota	60% Kab dan 65% Kota
		3	Jumlah fasilitasi pembinaan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)	34 Provinsi	34 Provinsi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
8	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1	Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas	66% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes
		2	Persentase Faskes yang memberikan informasi Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi	66% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes
		3	Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKRBKL-UPPKS dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar)	20% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan
		4	Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi	20% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan
		5	Jumlah fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	34	34
9	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	65,5%	70,5%
		2	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	65,5%	70,5%
		3	Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	80%	80%
		4	Persentase Kelompok BKB HI yang mendapat pembinaan KKBPK	15%	17,5%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		5	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita yang berkualitas	34	34
10	Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)	1	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	51	52
		2	Indeks pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi	51	52
		3	Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	75,5%	76%
		4	Persentase remaja yang mengakses PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK)	28%	30%
		5	Jumlah fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja	34 prov	34 prov
11	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan	1	Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan	9%	10%
		2	Persentase Keluarga yang Memiliki Lansia Ikut BKL	8%	8%
		3	Persentase PPKS yang Memberikan Pelayanan Komprehensif	45%	50%
		4	Jumlah fasilitasi pembinaan BKL dan PPKS yang berkualitas	34	34
12	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB	1	Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	71,5%	72,5%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		2	Persentase keluarga pra sejahtera yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kejahtera (UPPKS)	54,9%	55,4%
		3	Persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan	82,2	90,2
		4	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang berkualitas	34	34
13	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK	1	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	88	90
		2	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK	88	90
		3	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	80	82
		4	Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari berbagai media	30	50
		5	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	69,1	79,1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		6	Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari tenaga lini lapangan	69,1	79,1
14	Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK	1	Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK	70%	80%
		2	Persentase mitra kerja melaksanakan program KKBPK	70%	80%
		3	Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM)	80%	90%
		4	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penguatan komitmen Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggerakkan operasional program KKBPK	34	34
15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK	1	Persentase Kab dan Kota yang mempunyai Jumlah PLKB/PKB sesuai ratio yg memadai (1:2 ideal)	60%	70%
		2	Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten	882	882
		3	Persentase SDM Lini Lapangan yang terampil melaksanakan tupoksi	80%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		4	Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standarisasi kompetensinya	70% dari jml PKB/PLKB	100% dari jml PKB/PLKB
		5	Persentase PKB/PLKB yang tersertifikasi	70%	100%
		6	Persentase pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Pembinaan program KKBPK di Lini lapangan	100% jml provinsi	100% jml provinsi
		7	Jumlah Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan	34	34
16	Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN	1	Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi	17	17
		2	Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	26	26
		3	Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi KKBPK (oleh mitra kerja, masyarakat umum, internal BKKBN, Pemangku kepentingan)	3 dari skala 4	4 dari skala 4
		4	Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK	591 orang	591 orang
		5	Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi yang berkualitas	19	19
17	Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)	1	Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		2	Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5
		3	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	100%	100%
18	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		2	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	85% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		3	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		4	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	85% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		5	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	110 Kab/Kota	110 Kab/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		6	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	34	34
		7	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	34	34
		8	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		9	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	Additional Users (PA tambahan): 965.000	Additional Users (PA tambahan): 744.000
		10	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/ kab	3 frek/th/ kab
		11	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	71,1	85
		12	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	66%	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		13	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	100% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		14	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	33 Prov dan 547 Kab/Kota	33 Prov dan 547 Kab/Kota
		15	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	34 Prov dan 514 Kab/Kota	34 Prov dan 514 Kab/Kota
		16	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100%	100%
		17	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100%	100%
		18	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100%	100%
		19	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100%	100%
		20	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	100%	100%
		21	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang	70%	80%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK		
		22 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	34	34
		23 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional		
		24 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK	100	100
		25 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah	34	34
		26 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	34	34
		27 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	34 prov dan 547 kab/kota	34 prov dan 547 kab/kota
		28 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100%	100%
		29 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		30	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	34	34
19	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK	1	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota	1	1
		2	Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK	10	5
		3	Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas	34	34
20	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP	1	Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100%	100%
		2	Jumlah satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang undangan	42	42
		3	Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	100 %	100 %
		4	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan	100%	100%
		5	Persentase Barang Inventaris Tercatat pada SIMAK BMN di semua tingkatan yang kredibel	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		6	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja
21	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	1	Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	4
		2	Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang merencanakan program dan anggaran yang berkualitas	62	62
		3	Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan	62	62
22	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten	1	Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal	100	100
		2	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	3 (skala 1-5)	4 (skala 1-5)
		3	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	90	100
		4	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	34 (1pusat, 33 prov)	34 (1pusat, 33 prov)
23	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran,	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
	kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	2	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumah tanggaan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		4	Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		5	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		6	Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, keprotokolan dan keamanan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		7	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan evaluasi	12	12
		24	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
2	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)			100	100
3	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran			12	12
4	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)			12	12
25	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan I	50%	45%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14 dok	14 dok
26	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan II	50%	45%
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14 dok	14 dok
27	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan III	50%	45%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	14 dok	14 dok
28	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	34	34
		2	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	34	34
29	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB	1	Persentase SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program Meningkatkan Kualitasnya	75%	80%
		2	Persentase SDM Tenaga Pegawai dan Tenaga Program yang mengikuti pelatihan	75%	80%
			Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang terfasilitasi untuk akreditasi	1	1
30	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional	1	Jumlah SDM Aparatur yang Meningkatkan Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri	40	40
		2	Jumlah SDM Aparatur dan Mitra Kerja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri	55	61

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Jumlah Kerjasama Internasional yang dapat Diimplementasikan	6	6
31	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS	1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	17	18
		2	Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian KB dan KS	3,2 (skala 1-4)	3,3 (skala 1-4)
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	34	34
32	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	16	17
		2	Tingkat Kepuasan Pengguna (user) terhadap Hasil Penelitian (Indeks)	3,3 (skala 1-4)	3,5 (skala 1-4)
33	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh
		2	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	14996	15995
		3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		4 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3	3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

**CONTOH FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Kementerian/Lembaga Provinsi/Kab/Kota : (a)
Tahun : (b)

Sasaran strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)

Petunjuk Pengisian:

1. **Header (a)** diisi nama kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
2. **Header (b)** diisi dengan tahun anggaran;
3. **Kolom (1)** diisi dengan sasaran strategis kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. **Kolom (2)** diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari kementeria/lembaga/ pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam kolom (1); dan
5. **Kolom (3)** diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

B. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

**CONTOH FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I**

Unit Eselon I Kementerian/Lembaga / SKPD : **(a)**
Tahun : **(b)**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. **Header (a)** diisi nama unit organisasi eselon I kementerian/lembaga/SKPD;
2. **Header (b)** diisi dengan tahun anggaran;
3. **Kolom (1)** diisi dengan sasaran strategis unit organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. **Kolom (2)** diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD dalam kolom (1); dan
5. **Kolom (3)** diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran

C. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

**CONTOH FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II**

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL : **(a)**
Tahun : **(b)**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. **Header (a)** diisi nama unit organisasi eselon II/ Unit Mandiri kementerian/lembaga;
2. **Header (b)** diisi dengan tahun anggaran;
3. **Kolom (1)** diisi dengan sasaran strategis unit unit organisasi eselon II/ Unit Mandiri kementerian/lembaga sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. **Kolom (2)** diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit organisasi eselon II/ Unit Mandiri kementerian/lembaga dalam (1); dan
5. **Kolom (3)** diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	DIISI DENGAN
1	Nomor urut
2	Diisi sasaran strategis Renstra BKKBN 2015-2019 (revisi)
3	Diisi indikator kinerja dalam Kontrak Kinerja Pusat/Provinsi
4	Diisi sasaran kinerja dalam Kontrak Kinerja Pusat/Provinsi
5	Diisi dengan target pencapaian kinerja dengan membagi menjadi target triwulanan. Untuk target yang hanya bisa diukur pada akhir tahun maka hanya diisikan pada triwulan IV. Target triwulanan adalah target absolut. Jika masih bentuk persentase maka
6	Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan DIPA masing-masing komponen tahun 2018. Pemilihan kegiatan didasarkan pada kewajaran aktivitas tersebut dalam mendukung tercapainya pencapaian Kontrak Kinerja Pusat/Provinsi
7	Diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan kolom 6, jumlah anggaran tidak harus sama
8	Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pada kolom 6
9	Diisi dengan alokasi jadwal kegiatan

Catatan: Untuk kegiatan manajerial yang menjadi Indikator Strategis di Luar Renstra dalam Kontrak Kinerja Pusat dan Provinsi agar mengacu pada kegiatan/aktivitas yang sudah dirinci di Kolom 6

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO